



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk
pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Sidang
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa ke XXIX di New York.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164/LN Tahun 1974.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Menteri luar Negeri/Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia

Untuk :

PERTAMA : Mempergunakan petunjuk-petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir
pada Instruksi Presiden ini selagai landasan dan pedoman dalam
menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Sidang Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-bangsa ke XXIX di New York.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Sidang
selama berlangsungnya Sidang tersebut.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik
Indonesia Menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa ke XXIX di New York.

KELIMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

SOEHARTO

JENDERAL TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1974

PETUNJUK UMUM UNTUK DELEGASI INDONESIA
PADA SIDANG MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
KE-XXIX

UMUM.

1. Sebagaimana lazimnya, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Delegasi ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke XXIX yang akan dimulai di New York pada tanggal 17 September 1974, sesuai dengan kepercayaan.

bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan forum politis yang tertinggi dan alat yang sangat berguna bagi pengembangan kestabilan dan pembangunan politik, Ekonomi dan sosial secara sejagad, terutama yang dihadapi negara-negara berkembang.

bahwa idealisme yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Panca Sila sejalan dengan azas-azas dasar serta tujuan Perserikatan Bangsa-bangsa.

dan karena itu dipercayai bahwa Indonesia dapat menyumbangkan pikiran serta amalhnya pada organisasi internasional ini, demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia pada umumnya.

2. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa ke-XXIX dimulai pada waktu-waktu Kita mencatat Perkembangan nasional dan internasional seperti berikut :
 - a) Di Indonesia sendiri pemupukan kestabilan Politik dan ekonomi setelah berakhirnya masa Repelita I dan kita baru saja memasuki tahun pertama masa Pelita II, Berjalan terus dengan baik, yang memberikan harapan-harapan yang lebih besar lagi pada Pemerintah dan rakyat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b) Kerjasama dengan negara-negara tetangga di wilayah Asia Tenggara dalam rangka ASEAN telah makin berkembang dan berhasil.
 - c) Di dunia internasional, kita melihat permulaan dari hasil-hasil pendekatan yang telah terjadi antara negara-negara besar.
 - d) Usaha-usaha mencari perdamaian di beberapa daerah krisis, seperti di Indo Cina, Timur Tengah dan terakhir di Cyprus, serta daerah-daerah lain, masih belum mendatangkan hasil seperti diharapkan.
 - e) Di bidang perjuangan melawan kolonialisme, sikap pemerintahan baru di Portugal, yang telah mengakui kemerdekaan bekas wilayah jajahannya Guinea-Bissau dan telah menyatakan akan memerdekakan jajahan-jajahannya yang lain, telah menimbulkan suasana baru yang selayaknya membuka kesempatan bagi tercapainya hasil-hasil yang lebih besar.
 - f) Di bidang ekonomi internasional, sesuai dengan keputusan Sidang Khusus ke-VI Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa yang baru lalu, dunia Menghadapi tugas besar untuk mengatur/ menciptakan suatu tata perekonomian dunia yang baru, yang diharapkan akan dapat mencegah/menghindari terjadinya lagi berbagai krisis seperti yang telah melanda dunia di waktu belakangan ini.
3. Dengan situasi seperti yang disebut itu sebagai latar belakang, maka dipercayai bahwa Delegasi yang dikirimkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-XXIX ini akan mempergunakan segala kesempatan untuk terus memperjuangkan dan membela Kepentingan-kepentingan Indonesia, mengadakan prakarsa-prakarsa yang konstruktif, dan waspada terhadap gejala-gejala yang dapat menghambat kemajuan stabilisasi kita secara langsung atau tidak langsung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a) Pemerintah dan rakyat Indonesia merasa gembira atas kemajuan-kemajuan yang telah dapat dicapainya dalam Tahun-tahun belakangan ini, yang telah rembawa bangsa kita lebih jauh lagi ke arah perkembangan yang penuh arti bagi kesentausaan bangsa dan perdamaian dunia. Hal itu mempertebal, Kepercayaan kita pada diri kita sendiri, dan selayaknya dapat lebih memantapkan pembawaan peranan kita di dunia internasional.
- b) Keyakinan kita pada kebenaran dari politik non alignment, yang bersumber pada politik luar negeri kita yang bebas dan aktif mendasari kerjasama kita di dalam dan dengan kelompok non-aligned, sejauh dan selama kerjasama itu bersifat konstruktif dan tidak merugikan Kepentingan Negara, bangsa dan tujuan hidup kita.
- c) Kerjasama diantara negara-negara ASEAN di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah terwujud dengan lebih nyata dalam dua tahun belakangan ini secara saling menguntungkan, seyogyanya diperkembangkan lebih lanjut.
- d) Sejalan dengan itu, kerjasama dengan kelompok Asia-Afrika, Kelompok 77 dan lain-lainnya yang melakukan Usaha-usaha yang paralel dengan kita, dapat dilaksanakan sebagaimana biasa, dan malahan ditingkatkan jika nyata-nyata menguntungkan.
- e) Dalam penggalangan kekuatan diantara negara-negara berkembang itu, hendaklah sedapat mungkin dihindarkan keterlibatan diri dalam aliran dan tuntutan-tuntutan yang ekstrim mengingat realitas di Indonesia yang masih memerlukan partisipasi negara-negara maju barat maupun negara-negara sosialis dalam proses pembangunan nasional.

Beberapa masalah internasional.

4. Pemerintah Indonesia merasakan sebagai salah satu tanggung jawabnya untuk juga secara wajar memperhatikan masalah-masalah internasional dan ikut Menyumbangkan pemikiran, usulusul atau prakarsa dalam menanggulangi masalah-masalah tersebut yang jika dibiarkan berlarut-larut akan dapat mempunyai akibat yang negatif pada masyarakat sedunia termasuk bangsa Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a) Indonesia berbesar hati bahwa akhirnya Bangladesh dapat diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, dan mengharapkan hal ini merupakan pertanda akan terwujudnya stabilitas yang langgeng di anak benua Asia Selatan.
- b) Indonesia menyambut dengan gembira diterimanya bekas-bekas wilayah jajahan Grenada dan Guinea-Bissau sebagai anggota baru Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- c) Dalam masalah Korea, Indonesia tetap pada pendapat bahwa untuk kebaikan semua pihak, dan sesuai pula dengan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri Masalah Korea hendaknya diserahkan cara penyelesaian pada rakyat Korea sendiri, sesuai dengan kehendak rakyat pemilik ke dua Korea. Sayogyanya ke dua pemerintah meneruskan membuka kembali dialog antara mereka demi untuk mrncapai penyelesaian secara damai.
- d) Indonesia menyesalkan tidak tercapainya kemajuan kongkrit dalam usaha membentuk samudera hindia sebagai wilayah damai, dan menyerukan kepada semua negara terutama-negara-negara besar untuk memberikan kerjasama mereka dalam usaha itu, setidak-tidaknya supaya tidak meningkatkan kehadiran militer mereka di samudera tersebut.
- e) Pemerintah Republik Indonesia mengakui Pemerintah Khmer yang dipimpin oleh Lon Nol, dan dalam menghadapi masalah Khmer ini, Delegasi Republik Indonesia hendaklah bertolak pangkal pada (1) pengakuan Pemerintah tersebut dan (2) keyakinan bahwa pertentangan dalam negeri Khmer hendaklah diselesaikan oleh rakyat Khmer sendiri tanpa campur tangan dari luar.
- f) Indonesia bergembira dengan berlangsungnya detente dan mengharapkan agar saling pengertian serta hubungan-hubungan yang lebih baik antara negara-negara besar dapat segera dimanfaatkan untuk mendapatkan penyelesaian dari berbagai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

masalah yang masih mengganggu perdamaian serta ketentraman di lain-lain bagian dunia.

- g) Suasana baru yang ditimbulkan oleh sikap pihak yang berkuasa di Portugal sekarang ini hendaknya dapat dipergunakan untuk lebih meningkatkan perjuangan melawan sisa-sisa kolonialisme dimanapun juga di dunia. Proses kemerdekaan di wilayah-wilayah bekas jajahan, dalam pada itu perlu dijaga dan diatur demikian rupa dengan mengikutsertakan Perserikatan Bangsa-bangsa agar dapat berjalan secara layak, adil dan sesuai dengan prinsip yang menuntut dihormatinya hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.
- h) Indonesia menyokong usaha-usaha yang bertujuan terlaksananya perlucutan senjata secara menyeluruh dan umum, menentang persenjataan nuklir dan menginginkan agar percobaan-percobaan nuklir dihentikan sama sekali. Dalam rangka ini, Indonesia menyokong gagasan diadakannya Konperensi Perlucutan Senjata Sedunia, asalkan didahului oleh persiapan-persiapan yang matang, sehingga tidak akan menjadi forum propaganda semata-mata.

Masalah ekonomi dan sosial.

- 5. Rentetan krisis-krisis di bidang ekonomi dan sosial yang melanda dunia sejak beberapa tahun yang lalu dan sampai kini tidak dapat dipecahkan menggaris bawahi bahwa tata ekonomi dan sosial dunia sekarang ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan-tuntutan pembangunan internasional dewasa ini.
Oleh karena itu semakin nyata di rasakan perlunya tata ini dirombak dan diganti dengan yang baru yang didasarkan atas keadilan, persamaan hak dan kedaulatan penuh setiap negara.
- 6. Sidang Khusus ke-VI Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan April yang baru lalu telah membenarkan tuntutan tersebut dan menandakan adanya saling ketergantungan semua bangsa didunia ini dan kait-mengkaitnya usaha-usaha untuk mengatasi krisis-krisis di bidang ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

hubungannya dengan pembangunan oleh karena itu kemauan politik dari setiap negara merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya usaha-usaba untuk membina tata ekonomi dan sosial dunia seperti yang dicita-citakan itu.

Oleh sidang khusus ke-VI Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut bahkan sudah digariskan beberapa dasar falsafah dan landasan bagi tata ekonomi dan sosial dunia yang baru itu serta cara-cara pelaksanaannya yang dituangkan dalam suatu “pernyataan (Deklarasi)” dan “Program Aksi”.

Karena kedua dokumen ini dalam sidang khusus yang baru lalu telah diterima dengan jalan konsensus maka yang sekarang masih menjadi persoalan adalah pelaksanaan konsensus itu sendiri yang merupakan tujuan utama Sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXIX tahun 1974

7. Dukungan sepenuhnya dari setiap negara berupa langkah-langkah nyata yang menunjang secara keseluruhan tata ekonomi dan sosial dunia yang baru akan mempunyai pengaruh yang besar yang bukan saja bagi suksesnya usaha pembangunan Indonesia tetapi juga akan membantu terciptanya hubungan yang baik dan harmonis antara negara, sehingga membantu pula tercapainya perdamaian dunia, sebaliknya apabila dukungan tersebut tidak didapat dikhawatirkan Indonesia sebagai negara berkembang yang telah berusaha mengerahkan daya dan dana dalam negeri melaksanakan pembangunan pertanian, industri dan diversifikasi serta pembangunan di bidang sosial dalam rangka repelita II dapat dihadapkan pada kekecewaan-kekecewaan yang tidak terduga sebagai akibat dari situasi dunia yang tidak menentu.
8. Perkembangan dunia akhir-akhir ini telah memberikan suatu momentum yang sangat tepat untuk menggugah kemauan politik dari negara-negara maju untuk mengatasi masalah-masalah yang perlu segera diselesaikan Khusus bagi Indonesia masalah-masalah tersebut adalah inflasi yang melanda dunia, ketidak stabilan moneter internasional, pangan, kependudukan pengembangan industri, perdagangan internasional, masalah yang menyangkut kerjasama internasional di bidang keuangan dan teknik, masalah di bidang pengangkutan lain-lain dan jasa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

9. Perserikatan Bansa-Bangsa merupakan Forum politis tertinggi yang diharapkan dapat memegang peranan utama dalam usaha mengatasi masalah-masalah yang erat hubungannya dengan masalah politik, ekonomi dan sosial khususnya yang dihadapi oleh negara-negara berkembang.

Jelaslah kiranya bahwa forum Perserikatan Bangsa-bangsa ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan selalu mengingat kepentingan Indonesia dalam hubungannya dengan negara berkembang terutama negara ASEAN dan negara non aligned.

Hal lain-lain.

10. Berdasarkan pada Petunjuk umum ini, Delegasi berpegang pada instruksi yang dirumuskan secara khusus, menurut perincian mata-mata acara Sidang Majelis Umum ke-XXIX, oleh Saudara Menteri Luar Negeri. Jika masih terdapat hal-hal yang dipersoalkan yang tidak tercaKup dalam instruksi Menteri Luar Negeri itu, kebijaksanaan Delegasi hendaknya dapat membimbing, kearah yang menguntungkan bagi kita.

Dalam hal-hal yang prinsipial, Delegasi hendaknya selalu berhubungan dengan Menteri Luar Negeri untuk selanjutnya dilaporkan dan dimintakan petunjuk dari Kepala Negara.

11. Setelah selesai Sidang Majelis Umum ke XXIX, selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan, hendaknya menyelesaikan suatu laporan yang menyeluruh dari hasil-hasil sidang kepada Presiden.

Jakarta 12 September 1974